

SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA
NOMOR : W1-A/010/OT.01.1/I/2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Langsa;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama dan Peradilan Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa 2012-2016.

KEDUA

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa;

KETIGA

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Surat Keputusan ini, pimpinan unit (Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris) diberikan tugas untuk:

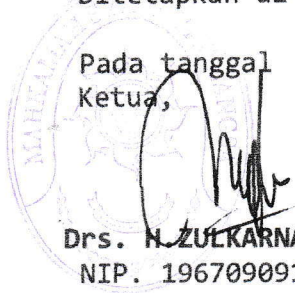
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan surat keputusan ini dan melaporkan kepada Panitera/Sekretaris untuk diteruskan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa;

KEEMPAT

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LANGSA

Pada tanggal : 03 Januari 2015
Ketua,



Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, MH
NIP. 196709091993031003

LAMPIRAN : 1

Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Nomor : W1-A4/264/OT.01.1/I/2015

Tanggal : 03 Januari 2015

1. Nama Unit Organisasi **Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa**
2. Tugas Pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
3. Fungsi
- a. Menerima dan memproses administrasi pendaftaran perkara.
 - b. Menyiapkan dan mengatur rencana persidangan perkara.
 - c. Menyelenggarakan administrasi persidangan.
 - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan.
 - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak.
 - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

4. Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan :


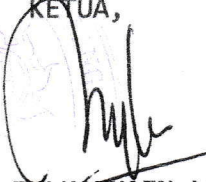
Kinerja Utama	Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penang-gung Jawab	Sumber Data
Peningkatan penyelesaian perkara	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara			
	prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara diselesaikan dengan mediasi	Hakim	Laporan
	prosentase Perkara yang putus tingkat pertama	perbandingan perkara diregister dengan diputus	Hakim	Laporan
	prosentase perkara yang diputus tingkat banding	perbandingan perkara diregister dengan diputus	Hakim	Laporan
	prosentase tunggakan perkara sisa yang diputus	perbandingan perkara diminutasi dengan sisa perkara	Hakim	Laporan
	prosentase tunggakan sisa	perbandingan sisa perkara	Hakim	Laporan

	perkara.	tahun sebelumnya		
	prosentase pelaksanaan sita.	perbandingan diselesaikan dengan permohonan	Hakim	Laporan
	prosentase pelaksanaan eksekusi.	perbandingan diselesaikan dengan permohonan	Hakim	Laporan
	prosentase perkara prodeo yang diterima	perbandingan realisasi dengan rencana kegiatan	Hakim	Laporan
	prosentase perkara jinayat yang diterima	perbandingan realisasi dengan rencana kegiatan	Pelaksana Jinayat	Laporan
Peningkatan pengawasan jalannya peradilan	Terlaksananya pengawasan peradilan secara efektif		Hakim	Laporan
	prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	perbandingan percepatan pelayanan dengan SOP	Hakim	Laporan
	prosentase perkara yang diselesaikan 6 bulan	perbandingan percepatan pelayanan dengan SOP	Hakim	Laporan
	prosentase perkara yang diselesaikan diatas 6 bulan	perbandingan percepatan pelayanan dengan SOP	Hakim	Laporan
	prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	Untuk mengukur kredibilitas peradilan	Hakim	Laporan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Terlaksananya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)			

	prosentase putusan yang dipublikasikan di website.	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase upload putusan ke direktori putusan MA	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase upload laporan aplikasi terpadu Mahkamah Syar'iyah Aceh	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase laporan perkara berbasis sms gateway	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase upload data perkara pada SIADPA Plus	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dipublikasikan di website.	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase laporan bulanan keuangan perkara yang dipublikasikan di website.	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase laporan pengembalian sisa panjar yang dipublikasikan di website.	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase laporan bulanan realisasi anggaran yang dipublikasikan di website.	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase laporan bulanan barang persediaan yang dipublikasikan di website.	perbandingan kemudahan akses informasi peradilan	Wakil Panitera	laporan
Peningkatan tatakelola administrasi	Terlaksananya ketertiban administrasi		Wakil Panitera	laporan

kepaniteraan.	kepaniteraan			
	prosentase registrasi perkara diterima tingkat pertama	perbandingan pencatatan dengan perkara yang diajukan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase registrasi perkara diterima tingkat banding.	perbandingan pencatatan dengan perkara yang diajukan	Wakil Panitera	laporan
	prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu (30 hari)	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu (60 hari)	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	Prosentasi pengiriman berkas perkara PK.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	Prosentase berkas perkara yang diminu-tasi tepat waktu (14 hari)	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase berkas perkara yang diarsip-kan.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase salinan putusan yang disam-paikan kepada para pihak.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase salinan putusan yang disam-paikan kepada KUA Kec.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase akta cerai yang diterbitkan.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan

	prosentase akta cerai yang diserahkan pada penggugat/pemohon.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase akta cerai yang diserahkan pada tergugat/termohon	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu (tgl. setiap bulan)	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase keuangan perkara yang digunakan.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke pihak dan Kas Negara	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan
	prosentase keuangan konsinyasi yang diserahkan.	perbandingan tingkat ketertiban administrasi perkara	Wakil Panitera	laporan


 KETUA,


Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, MH
 NIP. 196709091993031003

LAMPIRAN : 2

Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa

Nomor : W1-A4/264/OT.01.1/I/2015

Tanggal : 03 Januari 2015

1. Nama Unit Organisasi : **Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Langsa**
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi organisasi dan financial kepada seluruh unsur dilingkungan pengadilan;
3. Fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan administrasi
b. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan;

4. Indikator Kinerja Utama Sekretariatan :

Kinerja Utama	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan pembinaan dan pengawasan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan			
	Prosentase anggaran yang tersedia.	perbandingan antara penyerapan dan pagu	PPK	DIPA
	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan	perbandingan antara kegiatan dan rencana	PPK	DIPA
	Prosentase pengadaan sarana & prasarana yang direalisasikan	perbandingan antara kegiatan dan belanja	PPK	DIPA
Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya bimbingan teknis aparat perdilan			
	Prosentase hakim yang mengikuti bimbingan.	perbandingan antara peserta yang diajukan dengan yang diikutsertakan	PPK	NON DIPA
	Prosentase pejabat kepaniteraan yang mengikuti bimbingan.	perbandingan antara peserta yang diajukan dengan yang diikutsertakan	PPK	NON DIPA
	Prosentase Jurusita yang mengikuti bimbingan.	perbandingan antara peserta yang diajukan	PPK	NON DIPA

		dengan yang diikutsertakan		
Peningkatan tatakelola administrasi kepegawaian	Terlaksananya ketertiban administrasi kepegawaian			
	Prosentase usul CPNS ke PNS.	perbandingan antara pengusulan dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul kenaikan pangkat regular.	perbandingan antara pengusulan dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan.	perbandingan antara pengusulan dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul penyesuaian ijazah.	perbandingan antara peserta yang ujian dengan kelulusan	Wasek	Simpeg
	Prosentase ujian penyesuaian ijazah.	perbandingan antara peserta yang ujian dengan kelulusan	Wasek	Simpeg
	Prosentase ujian dinas tingkat III	perbandingan antara peserta yang ujian dengan kelulusan	Wasek	Simpeg
	Prosentase ujian dinas tingkat IV	perbandingan antara peserta yang ujian dengan kelulusan	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul pensiun.	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul promosi dan mutasi	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg

	Prosentase diklat pim II	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase diklat pim III	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase diklat pim IV/V	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul kepemilikan karpeg	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul kepemilikan ASKES	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase usul kepemilikan karis/karsu	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase penataan file pegawai	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase update data simpeg	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase izin cuti tahunan	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase izin cuti alasan penting	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase izin cuti sakit	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase izin cuti besar	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase izin cuti bersalin	perbandingan antara usul dengan	Wasek	Simpeg

		realisasi		
	Prosentase izin cuti diluar tanggungan negara	perbandingan antara usul dengan realisasi	Wasek	Simpeg
	Prosentase penerbitan SPMJ/SPMT	perbandingan antara penerbitan dengan jumla pegawai	Wasek	Simpeg
	Prosentase kenaikan gaji berkala	perbandingan antara penerbitan dengan jumla pegawai	Wasek	Simpeg
	Prosentase penerbitan KP.4	perbandingan antara penerbitan dengan jumla pegawai	Wasek	Simpeg
Peningkatan tatakelola administrasi keuangan	Terlaksananya ketertiban administrasi keuangan			
	Prosentase penerimaan PNBP	perbandingan antara penerimaan dengan MAP	Bendahara Penerima	Laporan
	Prosentase penyetoran PNBP	perbandingan antara penerimaan dengan penyetoran kas negara	Bendahara Penerima	Laporan
	Prosentase laporan keuangan tepat waktu	perbandingan waktu antara penyampaian laporan dengan ketentuan	Kasub/Kaur Keuangan	LRA
	Prosentase realisasi pagu anggaran	perbandingan antara realisasi dengan pagu anggaran secara total	Kasub/Kaur Keuangan	LRA
	Terlaksananya belanja operasional			
	Prosentase penyerapan anggaran belanja barang non operasional	perbandingan antara realisasi	PPK	LRA

		dengan pagu		
	Prosentase penyerapan anggaran prodeo	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
	Prosentase penyerapan anggaran belanja pemberkasan perkara	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
	Prosentase penyerapan belanja barang operasional	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
	Prosentase penyerapan belanja gaji pegawai	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
	Prosentase penyerapan uang makan	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
	Prosentase penyerapan remunerasi	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
	Prosentase penyerapan uang lembur	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA
Peningkatan tatakelola administrasi Umum	Terlaksananya ketertiban administrasi Umum/Perlengkapan			
	Prosentase pengelolaan surat masuk.	perbandingan antara pencatatan dengan surat yang masuk	Kasub/Kaur Umum	Statistik
	Prosentase pengelolaan surat keluar.	perbandingan antara pencatatan dengan surat yang masuk	Kasub/Kaur Umum	Statistik
	Prosentase asset tanah bersertifikat.	perbandingan antara sertifikat dengan jumlah lokasi tanah	Kasub/Kaur Umum	Simak BMN
	Prosentase asset gedung yang memiliki IMB.	perbandingan antara surat	Kasub/Kaur	Simak BMN

		izin dengan bangunan	Umum	
	Prosentase BPKB kendaraan roda.	perbandingan antara buku BPKB dengan jumlah kendaraan	Kasub/Kaur Umum	Simak BMN
	Prosentase BPKB kendaraan roda 4	perbandingan antara buku BPKB dengan jumlah kendaraan	Kasub/Kaur Umum	Simak BMN
	Prosentase izin penghunian rumah dinas.	perbandingan antara surat izin dengan bangunan	Kasub/Kaur Umum	Simak BMN
	Prosentase penetapan status aset.	perbandingan antara status aset dengan aset/inventaris	Kasub/Kaur Umum	Simak BMN
Peningkatan standarisasi sarana pengadilan	Terlaksananya pembangunan dan pengadaan		PPK	DIPA
	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan & mesin kantor	perbandingan antara realisasi dengan pagu	PPK	LRA

KETUA

Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS, MH
NIP. 196709091993031003